

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP KUALITAS PEMERINTAHAN DAN
KINERJA EKONOMI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Sri Andayani
105020100111076**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KUALITAS PEMERINTAHAN DAN KINERJA EKONOMI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

Yang disusun oleh :

Nama : Sri Andayani
NIM : 105020100111076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 12 Maret 2014.

Malang, 12 Maret 2014
Dosen Pembimbing,



Ferry Prasetya, SE., M.App.Ec.Int
NIP. 132 310 387 19801228 200501 002

**Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi
Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**
*Analysis of Fiscal Decentralization Impact on Governance Quality and Economic Performance in
Districts/Cities Region of East Java Province*

Sri Andayani

Ferry Prasetya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : Sriandayanifeub@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the impact of fiscal decentralization on governance quality and economic performance in districts/cities region of east java province in period of 2011, whether fiscal decentralization able to improve governance quality and economic performance directly or indirectly. By PLS (Partial Least Squares) method analysis, this study reveals that fiscal decentralization impact in district/city region of east java on governnace quality is negatif and signifikan, however positif and signifikan on economic performance. Thus this paper concludes that fiscal decentralization improves governance quality not yet but increasing economic performance in districts/cities region of east java province.

Keywords : *Fiscal decentralization, governance quality, economic performance, PLS (Partial Least Squares)*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011, apakah desentralisasi fiskal mampu memperbaiki kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi secara langsung atau tidak secara langsung. Melalui penggunaan metode Partial Least Squares (PLS), penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempengaruhi kualitas pemerintahan secara negatif dan signifikan secara langsung sedangkan mempengaruhi kinerja ekonomi secara positif dan signifikan secara langsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal belum mampu memperbaiki kualitas pemerintahan akan tetapi telah meningkatkan kinerja ekonomi di daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.

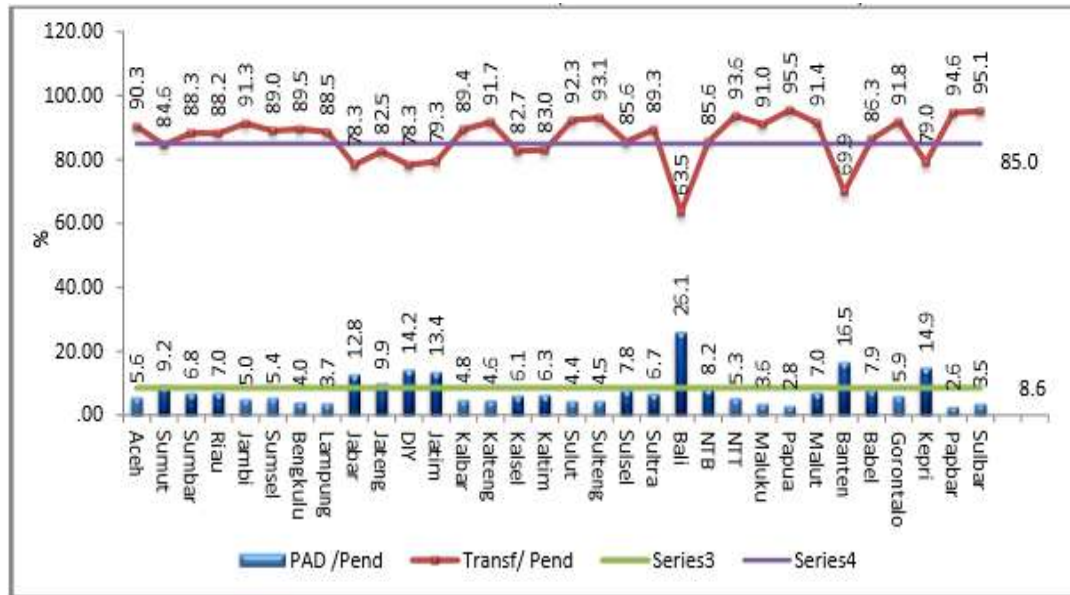
Kata Kunci : *Desentralisasi fiskal, kualitas pemerintahan, kinerja ekonomi dan PLS (Partial Least Squares)*

A.PENDAHULUAN

Keputusan otonomi daerah satu dekade silam telah melahirkan hubungan baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sumber daya penting keuangan sebagai faktor pendukung penting dalam proses dan perjalanan otonomi daerah atau yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum dipandang dari kewenangan pengeluaran yang mana daerah diberikan diskresi untuk membelanjakan sumber fiskalnya melalui dukungan dana transfer (Oktarida,2012 dan Parhah, *tanpa tahun*). Padahal, pada prinsipnya pelimpahan wewenang yang dimaksud tidak hanya sekedar menjalankan delegasi pengeluaran fiskal dari pemerintah pusat semata akan tetapi kewenangan fiskal untuk memenuhi tuntutan kemandirian fiskal (Adi,2005) dalam kerangka otonomi daerah.

Agregasi kemandirian daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur masih menunjukkan dibawah 50% artinya bahwa kemampuan keuangan daerah sebagian besar disumbang oleh dana transfer pemerintah pusat. Sebagai ilustrasi dari pernyataan tersebut lihat gambar 1.

Gambar 1.Perbandingan Agregasi Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Provinsi Indonesia Lainnya Tahun 2011

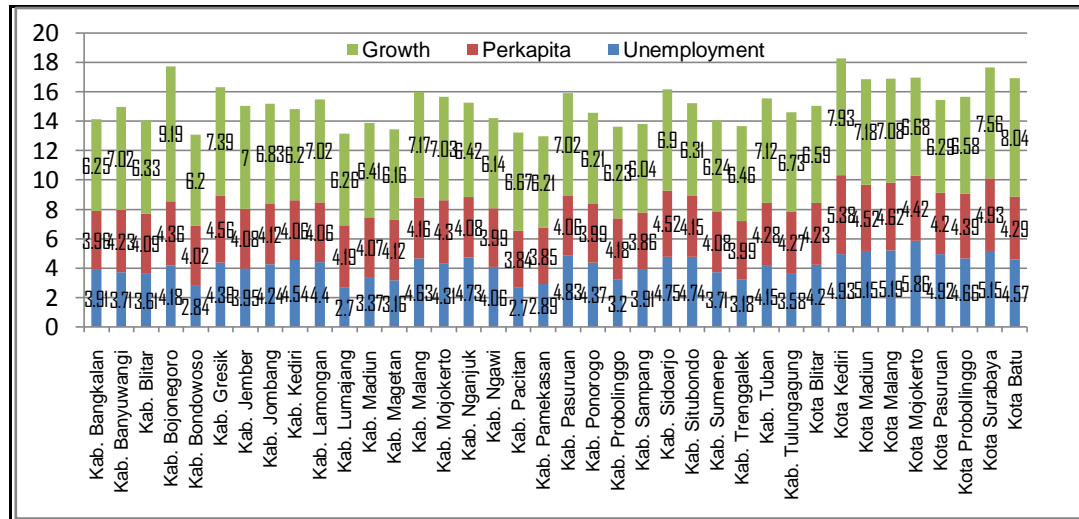


Sumber : DJPK, Deskripsi & Analisis APBD tahun 2011

Kondisi demikian dapat terjadi karena tingkat diskresi penerimaan yang rendah dimana ditunjukkan dengan pengaturan kewenangan perpajakan yang kurang mendukung *local taxing power* (Zulianto, 2010). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khusaini (2006) bahwa pemerintah pusat masih memiliki wewenang terkait dengan aspek-aspek penerimaan. Sehingga hal inilah yang kemudian memicu perilaku pemerintah terkait peningkatan kapasitas fiskal daerah. Menurut Aristovnik (2012) perilaku tersebut mengacu pada kualitas pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi desentralisasi fiskal sata ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.

Selain untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, desentralisasi fiskal juga bertujuan juga untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Bagi daerah yang memiliki tata kelola daerah yang berkualitas maka tidak menutup kemungkinan akan memicu peningkatan kinerja ekonomi. Kondisi kinerja ekonomi di daerah kabupaten/kota provinsi jawa timur sendiri dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut.

Gambar 2. Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 (data diolah)

Melihat dari gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Jawa Timur sudah baik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 6% ke atas. Di sisi lain sejumlah 55% daerah dengan tingkat pengangguran di atas rata-rata dan mayoritas diduduki oleh daerah-daerah yang notabennya dominan pada kawasannya investor khususnya bidang industri seperti Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kab. Gresik dan Kota Pasuruan, dsb. Sedangkan untuk Kota Kediri menduduki pendapatan perkapita tertinggi dan disusul dengan Kota Surabaya.

Dalam penelitian Adi (2005) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan lebih baik selama pelaksanaan desentralisasi fiskal dibandingkan sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil Rodriguez-pose & Kroijer (2009) yang mana ada korelasi negatif antara pengeluaran dana transfer kepada pemerintah sub-nasional terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi sebaliknya kecenderungan korelasi positif desentralisasi pendapatan (taxes assigned) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk penelitian selanjutnya yang melatarbelakangi bahwa kualitas pemerintahan berperan bagi kinerja ekonomi yaitu Badjun (2005) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa ada hubungan positif antara kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil pendapat yang tidak sejalan yakni menyatakan bahwa kemandirian fiskal mengakibatkan kualitas tata kelola pemerintahan menurun di negara-negara OECD.

Melihat implementasi desentralisasi fiskal di daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih menyisakan sejumlah masalah seperti rendahnya kualitas pemerintahan dan tingginya tingkat pengangguran di sejumlah daerah di Jawa Timur dan selain itu karena sebagian besar penelitian terdahulu fokus hanya pada pada analisis keterkaitan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dan atau desentralisasi fiskal dan kualitas pemerintahan saja serta kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi secara parsial. Maka penulis tertarik untuk mengaitkan desentralisasi fiskal, kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi secara simultan dengan unit analisis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Hal ini kemudian dapat ditarik permasalahan penelitian yaitu : 1) bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan; 2) bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi; 3) bagaimana pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teori *fiscal federalism* dibagi dalam dua perspektif yaitu teori tradisional atau teori generasi pertama (*First Generation Theories*) dan teori perspektif baru atau teori generasi kedua (*Second Generation Theories*). Pandangan teori generasi pertama terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi, diantaranya adalah *pertama*, mengenai penggunaan *knowledge in society*, Implementasi desentralisasi fiskal menempatkan pemerintah daerah mampu menyelaraskan penyediaan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara spesifik (Oates,2007). *Kedua*, Tiebout Model yang mana menunjukkan bahwa persaingan pemerintah dan kompetisi antar daerah mengenai alokasi pengeluaran publik tidak menutup kemungkinan masyarakat akan memilih barang dan jasa publik sesuai dengan preferensi masyarakat.

Perhatian teori generasi pertama lebih mengarah pada kemampuan daerah untuk mencapai kondisi *self financing* dalam pembiayaan pengeluaran. Sedangkan teori generasi kedua (*Second Generation Theory*) lebih menakan pada pentingnya *revenue* dan *expenditure assignment* antar level pemerintahan. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal mampu berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Artinya bahwa ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merancang peraturan tentang ekonomi lokal, otomatis campur tangan pemerintah pusat menjadi terbatas.

Desentralisasi merupakan mekanisme efektif untuk meningkatkan akuntabilitas daerah. Sebagaimana secara logika dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 1. Political Accountability and Voter Welfare Theory

	State <i>a</i>	State <i>b</i>
Policy <i>A</i>	0,3	<i>r</i> ,0
Policy <i>B</i>	<i>r</i> , 1	0,1

Sumber : Hindriks & Myles, 2004 (Intermediete Public Economics.hal:462)

State a adalah politisi membuat keputusan baik dan buruk pada *state b* . Maka jika pemerintah mengadopsi kebijakan A, dimana hal ini lebih baik di *state a* atau kebijakan B di mana lebih baik di *state b*. Dengan kata lain pemilihan kebijakan A oleh *state a* maka akan mengakibatkan relatif buruk bagi *state b*. Begitu juga untuk kebijakan B yang diadopsi oleh *state b* maka akan mengakibatkan *state a* relatif lebih buruk. Hal ini lah yang kemudian menstimulus masing-masing politisi berlomba untuk meningkatkan akuntabilitasnya dalam rangka mempertahankan kedudukannya melalui pilihan rakyat.

Selain dari pada itu dalam *Endogenous Growth Model* dapat diterangkan bagaimana pajak dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah yang dibiayai oleh pajak (*public input*). Pada tingkat input publik yang rendah pertumbuhan negatif, selanjutnya dengan tingkat pajak yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi (*g*). Namun pada akhirnya pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang terlalu eksefis akan menurunkan pertumbuhan ekonomi disebabkan tingkat pajak yang terlalu tinggi sehingga mendistorsi ekonomi.

Hipotesis

Berdasarkan kajian empiris dan teoritis, dugaan awal yang dapat diambil adalah 1) diduga desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pemerintahan; 2) diduga

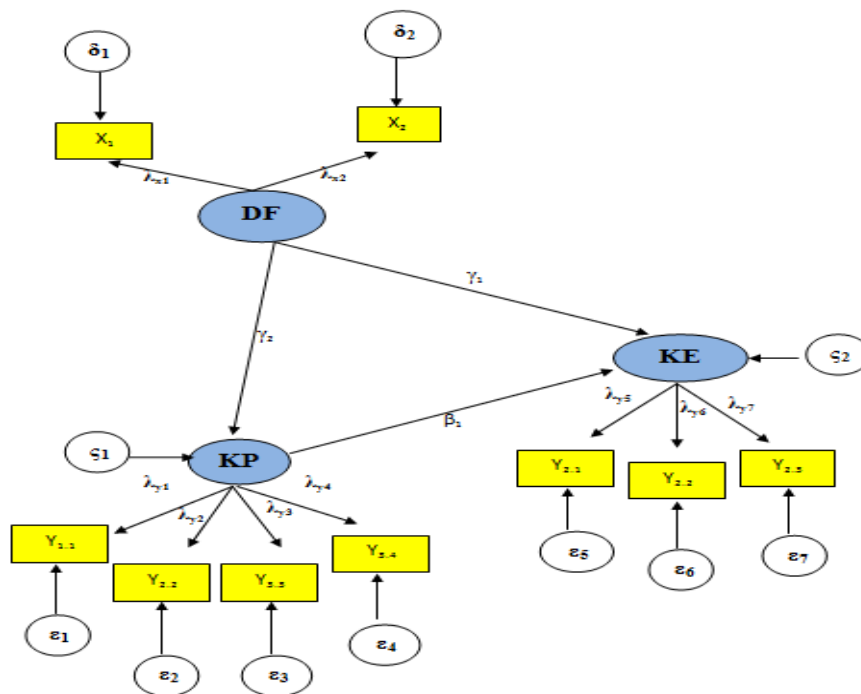
desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ekonomi; 3) diduga kualitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ekonomi.

C. METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data *cross section*. Penggunaan variabel laten memungkinkan metode *Partial Least Squares* (PLS) untuk melihat pengaruh antar variabel konstruk maupun konstruk dan pengukurannya. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian maka diagram jalur PLS adalah sebagai berikut.

Gambar 3. Diagram Jalur Antar Variabel dalam Penelitian



Sumber: Peneliti, 2013

Keterangan :

DF = Desentralisasi Fiskal

KP = Kualitas Pemerintahan

KE = Kinerja Ekonomi

λ_x = *Loading factor* variabel eksogen

λ_y = *Loading factor* variabel endogen

Λ_x = Matriks *loading factor* variabel laten eksogen

Λ_y = Matriks *loading factor* variabel laten endogen

β = Koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen

γ = Koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

ζ = Galat model

δ = Galat pengukuran pada variabel manifest untuk variabel laten eksogen

ε = Galat pengukuran pada variabel manifest untuk variabel laten endogen

Konversi diagram jalur pada model PLS kedalam bentuk persamaan *outer model*, *inner model* dan *weight relations* dapat ditulis sebagai berikut.

a) **Outer model** :

Untuk variabel eksogen Desentralisasi Fiskal (refleksif)

$$X_1 = \lambda_{x1}DF + \delta_1$$

$$X_2 = \lambda_{x2}DF + \delta_2$$

Untuk variabel endogen Kualitas Pemerintahan (reflektif)

$$Y_1 = \lambda_{y1.1}KP + \varepsilon_1$$

$$Y_2 = \lambda_{y1.2}KP + \varepsilon_2$$

$$Y_3 = \lambda_{y1.3}KP + \varepsilon_3$$

$$Y_4 = \lambda_{y1.4}KP + \varepsilon_4$$

Untuk variabel endogen Kinerja Ekonomi (reflektif)

$$Y_1 = \lambda_{y2.1}KE + \varepsilon_5$$

$$Y_2 = \lambda_{y2.2}KE + \varepsilon_6$$

$$Y_3 = \lambda_{y2.3}KE + \varepsilon_7$$

b) **Inner Model** :

Untuk hubungan desentralisasi fiskal dan kualitas pemerintahan

$$KP = \gamma_2DF + \zeta_1$$

Untuk hubungan desentralisasi fiskal dan kualitas pemerintahan terhadap

$$KE = \gamma_1DF + \beta_1KP + \zeta_2$$

c) **Weight relation** :

Nilai pada masing-masing variabel konstruk yang diprediksi dalam PLS ialah Untuk sebagai berikut :

$$\zeta = \sum_{kb} W_{kb} X_{kb}$$

$$\eta = \sum_{ki} W_{ki} Y_{ki}$$

Keterangan :

W_{kb} dan W_{ki} adalah k *weight* yang digunakan untuk membentuk estimasi variabel laten (ζ_b) dan endogen (η_i).

Goodness Of Fit

Outer Model: *Loading factor*, di mana menunjukkan korelasi antara skor indikator refleksif dengan skor variabel latennya. Pengambilan jumlah indikator laten yang relatif sedikit, nilai loading 0,5 – 0,6 di rasa cukup untuk memenuhi persyaratan korelasi terhadap variabel konstraknya. *Composite reliability*, menunjukkan nilai pengukuran dari kelompok indikator yang mengukur variabel konstraknya, akan baik jika nilainya lebih besar dari 0,7 (Jaya & Sumertajaya, 2008). *Average variance extracted, square root of average variance extracted (AVE)* adalah metode untuk menilai *discriminant validity*. Nilai AVE diharuskan di atas 0,50. *Discriminant validity*, membandingkan nilai *squares root of average variance extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya. *Discriminant validity* yang baik jika nilai AVE konstruk lebih tinggi dari pada korelasi dengan seluruh konstruk lainnya. Setidaknya nilai AVE harus mencapai 0,50 sebagai standar kelulusan uji *discriminnat validity*. *Cross Loading*, merupakan ukuran lain dari validitas diskriminan. Diharapkan

tiap indikator memiliki *loading* yang lebih tinggi untuk tiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator untuk menilai variabel laten lainnya.

Inner Model: *R-squares*, untuk variabel laten endogen. Hasil R^2 sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 untuk variabel laten endogen dalam model struktural masing-masing menyatakan bahwa model tersebut adalah *baik*, *moderat* dan *lemah*. *Estimasi* Koefisien Jalur, nilai estimasi untuk hubungan jalur harus signifikan. Nilai signifikansi dalam model struktural diperoleh dengan prosedur *bootstrapping*. Melalui prosedur ini, akan didapatkan nilai t-statistik dan signifikansi dari koefisien parameter yang sesuai dengan jumlah sampel yang dianalisis. F^2 untuk *effect size*, terdapat 3 kriteria penilaian dalam f^2 , yaitu bernilai 0.02, 0.15, 0.35. Untuk variabel laten masing-masing diinterpretasikan memiliki pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural. Relevansi prediksi (Q^2 dan q^2), nilai Q^2 digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya. Sementara nilai q^2 digunakan untuk menilai dampak relatif model struktural terhadap pengukuran variabel dependen laten. Pada inner model yang digunakan ialah *Q-Squares* yang menunjukkan kemampuan estimasi parameternya dalam menjelaskan model. Model dapat dikatakan *predictive relevance* jika nilai Q -squares > 0 dan begitu pula sebaliknya.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dihimpun dari beberapa lembaga. Data desentralisasi fiskal (rasio PAD + BHPBP terhadap belanja daerah dan rasio PAD terhadap DAU) diperoleh dari Kementerian Keuangan. Data kualitas pemerintahan (akses lahan, biaya transaksi, keamanan dan penyelesaian konflik dan perizinan usaha) diperoleh dari KPPOD dan sedangkan untuk data kinerja ekonomi (pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pendapatan perkapita) diperoleh dari BPS Indonesia. Periode penelitian ini adalah pada tahun 2011.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel bertujuan untuk memberikan batasan yang tegas terhadap variabel seklaigus persamaan persepsi atas penggunaan variabel. Definisi operasional dijelaskan secara rinci pada tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Referensi	Sumber data
1	Rasio penjumlahan PAD dan BHPBP terhadap belanja daerah (X_1)	Kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan perbandingan total PAD dan BHPBP terhadap total belanja daerah pada tahun bersangkutan	Uchimura & Suzuki (2009), Bird (2000), Khusaini (2006)	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 2011
2	Rasio PAD terhadap DAU (X_2)	Kemandirian fiskal daerah yang dilihat dari rasio PAD terhadap DAU yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali penerimaan daerah	Uchimura & Suzuki (2009), Bird (2000), Khusaini (2006)	Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (DJPK) 2011
3	Indeks Akses Lahan ($Y_{1.1}$)	Indeks yang diterbitkan oleh KPPOD, merupakan penilaian terhadap kualitas akses lahan di Kabupaten dan Kota meliputi kepengurusan sertifikat tanah, perolehan tanah, frekuensi pengurusan tanah, frekuensi kasus konflik kerjasama	McChulloch & Malesky (2011), Dethier (1999), Treisman (2000)	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2011

No.	Variabel	Definisi	Referensi	Sumber data
		atas penggunaan tanah dan dampak lahan bagi kelangsungan usaha		
4	Indeks biaya transaksi ($Y_{1,2}$)	Indeks yang diterbitkan oleh KPPOD, merupakan penialain kualitas penetapan kebijakan biaya transaksi yang meliputi antara lain pajak, retribusi, biaya transaksi lainnya baik legal maupun ilegal.	McChulloch & Malesky (2011), Kyriacou & Roca-Sagales (2009), Treisman (2000)	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2011
5	Indeks keamanan dan penyelesaian konflik ($Y_{1,3}$)	Indeks yang diterbitkan oleh KPPOD, menilai kualitas pertanggungjawaban/kinerja pemerintah untuk menciptakan keamanan berusahaan meliputi fungsi pencegahan, pengamanan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan pelanggaran hukum.	McChulloch & Malesky (2011), Kyriacou & Roca-Sagales (2009), Treisman (2000)	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2011
6	Indeks perizinan usaha ($Y_{1,5}$)	Indeks yang diterbitkan oleh KPPOD, menilai kualitas pemerintahan yang dipandang dari persentase perusahaan yang memiliki tanda daftar perusahaan, kemudahan perolehan TDP, tingkat biaya dan persepsi terhadap TDP, kualitas pelayanan izin usaha, keberadaan mekanisme pengaduan, persentase tingkat hambatan izin usaha.	McChulloch & Malesky (2011), Kyriacou & Roca-Sagales (2009), Treisman (2000)	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2011
7	Laju pertumbuhan ekonomi ($Y_{2,1}$)	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk migas dan non-migas (%)	Dethier (1999), Jin & Zou (2005), Adi (2005), McChulloch & Malesky (2011)	Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011
8	Pendapatan perkapita ($Y_{2,2}$)	Produk Domestik Regional Bruto terhadap dibagi total jumlah penduduk kab/kota dimana yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.	Dethier (1999), Jin & Zou (2005), Adi (2005), McChulloch & Malesky (2011)	Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011
9	Pengangguran ($Y_{2,3}$)	Pertumbuhan angka penduduk yang berada pada kondisi dimana tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu dan sedang berusaha untuk dapat pekerjaan (%)	Hammond & Tosun (2009), Faridi et al (2012)	Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011

Sumber: Peneliti, 2013

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebagai langkah untuk mengukur seberapa baik model dalam penelitian digunakan. Maka langkah pertama adalah memastikan model memenuhi syarat lolos pada uji goodness of fit. Pengujian model dengan *Partial Least Squares* (PLS) di bagi menjadi empat yaitu goodness of fit of model pengukuran refleksif, goodness of fit model struktural, pendugaan model pengukuran dan pendugaan model struktural.

Goodness of fit model pengukuran refleksif

Menggunakan uji *Loading Factor* pada dasarnya untuk mengevaluasi korelasi antara indikator dengan konstruksinya. Ukuran refleksif dikatakan tinggi jika bernilai di atas 0,70. Akan tetapi jika ukuran tersebut bernilai 0,50 hingga 0,60, maka ukuran ini masih dapat diterima.

Tabel 3. Hasil Loading Factor

Variabel	Indikator	Nilai Loading Factor	Keterangan
Desentralisasi Fiskal (X_1)	1. Proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah ($X_{1,1}$)	0,9496	Valid
	2. Rasio PAD terhadap DAU ($X_{1,2}$)	0,9101	Valid
Kualitas Pemerintahan (Y_1)	1. Indek Akses Lahan ($Y_{1,1}$)	0,8117	Valid
	2. Indek Biaya Transaksi ($Y_{1,2}$)	0,7213	Valid
	3. Indek Keamanan & Penyelesaian Konflik ($Y_{1,3}$)	0,8399	Valid
	4. Indek Perizinan Usaha ($Y_{1,4}$)	0,6024	Valid
Kinerja Ekonomi (Y_2)	1. Pertumbuhan Ekonomi ($Y_{2,1}$)	0,7949	Valid
	2. Pendapatan Perkapita ($Y_{2,2}$)	0,9160	Valid
	3. Pengangguran ($Y_{2,3}$)	0,7391	Valid

Sumber : Output SmartPLS,2013 (data diolah)

Kedua, uji *composite reliability* untuk mengukur konsistensi internal, dan untuk standarisasi daripada konsistensi internal tersebut nilainya harus di atas 0,7.

Tabel 4. Hasil Composite Reliability

Variabel	Nilai Composite Reliability
Desentralisasi Fiskal (X_1)	0,9276
Kualitas Pemerintahan (Y_1)	0,8347
Kinerja Ekonomi (Y_2)	0,8593

Sumber : Output SmartPLS,2013 (data diolah)

Ketiga, uji *Average Variance Extracted* (AVE) adalah metode untuk menilai *discriminant validity*. Untuk memenuhi kriteria validitas diskriminan, nilai AVE harus di atas 0,50.

Tabel 5. Hasil AVE

Variabel	AVE
Desentralisasi Fiskal (X_1)	0,8651
Kualitas Pemerintahan (Y_1)	0,5618
Kinerja Ekonomi (Y_2)	0,6724

Sumber : Output SmartPLS,2013 (data diolah)

Keempat, uji *Discriminant Validity*, kriteria lolos uji AVE adalah nilai akar AVE lebih tinggi dari skor korelasi antar variabel latennya.

Gambar 6. Hasil Validitas Diskriminan

Variabel	AVE	Akar AVE	Skor Korelasi Antar Variabel Laten		
			DF (X_1)	KP (Y_1)	KE (Y_2)
Desentralisasi Fiskal (X_1)	0,8651	0,9301			
Kualitas Pemerintahan (Y_1)	0,5618	0,7495	-0,5109		
Kinerja Ekonomi (Y_2)	0,6724	0,82	0,6991	-0,3406	

Sumber : Output SmartPLS,2013 (data diolah)

Goodness of fit model pengukuran struktural

Predictive-relevance (Q^2), pada dasarnya untuk melihat kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variabilitas variabel endogen. Adapun formula $Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)$, dimana nilai R^2 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Perhitungan R^2 pada Variabel Endogen

Variabel Endogen	Nilai R^2
<i>Desentralisasi Fiskal</i> (X_1)	
Kualitas Pemerintahan (Y_1)	$R_1^2 = 0,2610$
Kinerja Ekonomi (Y_2)	$R_2^2 = 0,4891$

Sumber : Output SmartPLS,2013 (data diolah)

Sehingga nilai Q^2 dapat diperoleh sebagai berikut :

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,2610)(1 - 0,4891)$$

$$Q^2 = 1 - (0,739)(0,5109)$$

$$Q^2 = 0,6224$$

Artinya bahwa variabilitas konstruk kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi dapat dijelaskan oleh desentralisasi fiskal sebesar 62,24% sedangkan selebihnya 37,76% dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain desentralisasi fiskal yang tidak masuk pada model.

Hasil Pendugaan Model Pengukuran

Indikator yang memiliki *loading weight* terbesar menunjukkan bahwa indikator tersebut sebagai pengukur variabel yang terkuat (dominan) dan indikator dikatakan signifikan dalam mengukur masing-masing variabel konstraknya jika memenuhi nilai di atas 1,96. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Pengujian Model Pengukuran

Variabel - Indikator	<i>Outer Loading</i>	T-Statistik	Signifikansi
Desentralisasi Fiskal <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah ($X_{1,1}$) • Rasio PAD terhadap DAU ($X_{1,2}$) 	0,9496 0,8100	135,35 33,42	Signifikan Signifikan
Kualitas Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> • Akses Lahan ($Y_{1,1}$) • Biaya Transaksi ($Y_{1,2}$) • Keamanan & Penyelesaian Konflik ($Y_{1,3}$) • Perizinan Usaha ($Y_{1,4}$) 	0,8117 0,7213 0,8399 0,6024	16,8105 10,7207 16,3755 5,4679	Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan
Kinerja Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi ($Y_{2,1}$) • Pendapatan Perkapita ($Y_{2,2}$) • Pengangguran ($Y_{2,3}$) 	0,7949 0,9160 0,7391	19,4737 85,2018 21,7336	Signifikan Signifikan Signifikan

Sumber : Output SmartPLS,2013 (data diolah)

Hasil Pendugaan Model Struktural.

Pengujian *inner model* pada dasarnya ialah untuk menguji hipotesis penelitian. Koefisien jalur bernilai negatif menunjukkan pengaruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara negatif sebaliknya jika bernilai positif menunjukkan pengaruh secara positif. Pengaruh antar variabelnya dapat dikatakan signifikan jika t-statistik > t-table (1,96). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 9.

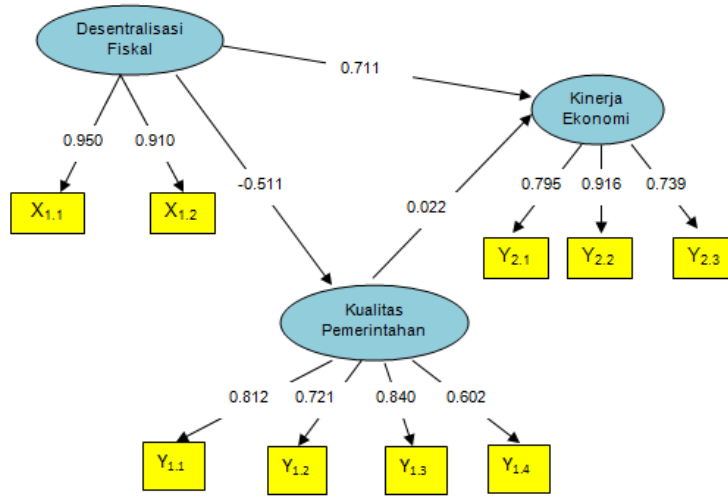
Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis dalam Inner Model

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien Jalur	T-Statistik	Keterang-an
Desentralisasi Fiskal (X_1)	Kualitas Pemerintahan (Y_1)	-0,5109	6,0457	Signifikan
Desentralisasi Fiskal (X_1)	Kinerja Ekonomi (Y_2)	0,7105	15,6643	Signifikan
Kualitas Pemerintahan (Y_1)	Kinerja Ekonomi (Y_2)	0,0224	0,3205	Tidak Signifikan

Sumber : Output SmartPLS,2013 (data diolah)

Sebagai ilustrasi hasil digram jalur dengan menggunakan PLS dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar4. Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis dalam *Inner Model*



Sumber : Output SmartPLS,2013

Berdasarkan pada tabel hasil pengujian hipotesis dalam *inner model* sebelumnya, maka dapat dinyatakan hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut.

Hipotesis 1 :Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan di daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada hasil pendugaan hipotesis, desentralisasi fiskal mempengaruhi kualitas pemerintahan secara negatif dan signifikan, dengan artinya bahwa hipotesis 1 ditolak.

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur

Hasil pendugaan menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima yang ditunjukkan pada nilai koefisien positif (0,7105) dan nilai t-statistik 15,66.

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi di daerah kabuapten/kota Provinsi Jawa Timur

Hasil pendugaan menunjukkan koefisien jalur positif (0,022) dan uji statistik 0,32. Sehingga hipotesis 3 tidak dapat diterima artinya hipotesis harus ditolak.

Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi melalui kualitas pemerintahan atau terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi tidak secara langsung namun positif dan signifikan melalui kualitas pemerintahan

Pengaruh tidak langsung adalah hasil perkalian diantara dua koefisien pengaruh langsung. Jika kedua pengaruh langsung yang membentuk pengaruh tidak langsung adalah signifikan maka pengaruh tidak langsung adalah signifikan dan sebaliknya jika salah satu koefisien atau kedua koefisien langsung tidak signifikan maka pengaruh tidak langsung adalah tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi dapat dikatakan tidak signifikan. Artinya bahwa hipotesis 4 ditolak.

Pembahasan.

Hasil penelitian pertama sejalan dengan kesimpulan penelitian Bartolini dan Santolini (2013) yang mana otonomi fiskal berdampak secara negatif terhadap kualitas pemerintahan. Selain itu penelitian Kyriacou dan Roca-sagales (2009) mengisyaratkan bahwa otoritas fiskal di negara berpendapatan menengah ke bawah mengakibatkan kualitas pemerintahan menurun. Menurutnya, hal ini terjadi karena kelembagaan politik masih belum berkembang dengan baik. Negara yang memiliki jumlah pemerintah subnasional banyak dapat menyebabkan tata pemerintahan menjadi buruk karena keterbatasan anggaran untuk mengekspos kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal (Mello dan Barenstein, 2001). Hal tersebut ditunjukkan juga dengan masih tingginya intervensi pemerintah pusat atas otoritas penerimaan daerah (Khusaini, 2006). Pendapat yang diutarakan Kyriacou dan Sagales (2009) dan Mello dan Barenstein (2001) cukup menunjukkan karakteristik alasan mengapa desentralisasi fiskal di Indonesia masih menyebabkan permasalahan kualitas pemerintahan.

Walaupun teori *accountability government theory* juga menjelaskan bahwa dengan asumsi pemerintah akan bertindak akuntabel jika voter (masyarakat) dapat memberikan sanksi dan reward atas tindakan pemerintah, tetapi pada kasus di Indonesia voter (masyarakat) lemah akan informasi mengenai perilaku dan *type* politis sehingga dalam proses pemilihan umum untuk memilih *good incumbent* sangat sulit. Pada akhirnya implementasi desentralisasi fiskal tidak dapat bekerja maksimum untuk memperbaiki kualitas pemerintahan jika tanpa kontrol yang baik dari berbagai pihak. Pada khususnya penelitian yang menggunakan objek kajiannya di negara-negara maju seperti OECD dan negara maju lainnya, sebagian besar kesimpulan menyatakan setuju jika desentralisasi fiskal mampu sebagai ajang promotor untuk memperbaiki kualitas pemerintahan. Sebagaimana kesimpulan Altunbaş dan Thornton (2011), Faguet (2011), Ivanyna dan Shah (2010). Karena pada prinsipnya negara-negara maju memiliki piranti-piranti pengontrol telah tersedia dengan baik guna mendukung desentralisasi fiskal untuk memperbaiki kualitas pemerintahan.

Berdasarkan pada hasil penelitian kedua, sejalan dengan kesimpulan yang diutarakan Rodriguez-Pose dan Kroijer (2009), Hammond dan Tosun (2006) di U.S, Adi (2005) di Indonesia, Lin dan Liu (2000) di China. Sebagaimana penjelasan bahwa desentralisasi fiskal akan menciptakan efisiensi dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi (Jin & Zou, 2005). Efisiensi tersebut dapat dibentuk melalui kedekatan dan keuntungan informasi yang diperoleh pemerintah daerah (Oates, 2007) dan pada akhirnya akan menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui kesesuaian antara penyediaan layanan publik dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat (Zhang & Zou, 1998; Hammond & Tosun, 2006; Lessman, 2009).

Selain itu, *The Tiebout Model* dengan asumsi *citizen mobility* yang sebagaimana dibangun oleh Charles M. Tiebout (Hyman, 1983) menjelaskan bahwa :

“The level and mix of local expenditures and taxes are likely to exhibit wide variations among local political. Therefore, many citizens will choose to live in communities where the government budget best satisfies their own preferences for public service, provided they are not restricted in their mobility among communities. Thus, government expenditure and revenue patterns tend to be set on the local level and the mobile citizen maximizes personal well being by choosing to live in some particular political jurisdiction”.

Keberadaan desentralisasi yang menciptakan *political jurisdiction* pada masing-masing tingkatan pemerintahan mendorong manusia untuk memilih daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik sehingga hal ini lah yang kemudian mempengaruhi pengeluaran dan penerimaan pemerintah cenderung untuk menggerakkan perbaikan layanan publik.

Desentralisasi fiskal membawa dampak bagi daerah untuk mengidentifikasi dan memungut sumber pajak serta mengumpulkan hasilnya. Artinya bahwa daerah memiliki otoritas dalam meningkatkan pendapatan daerah pasca desentralisasi fiskal. Melalui *Endogenous Growth Model* dapat diterangkan bagaimana pajak dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah yang dibiayai oleh pajak (*public input*). Pada tingkat input publik yang rendah pertumbuhan negatif, selanjutnya dengan tingkat pajak yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi (*g*). Namun pada akhirnya pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang terlalu ekssesif akan menurunkan pertumbuhan ekonomi disebabkan tingkat pajak yang terlalu tinggi sehingga mendistorsi ekonomi.

Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa pengaruh antara kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi tidak signifikan. Artinya bahwa kondisi kualitas pemerintahan baik pada titik rendah atau tinggi kurang memiliki peran bagi peningkatan kinerja ekonomi. Menurut Ahrens dan Meurers (2002) bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi kebijakan yang efektif dan stabil serta kerangka kelembagaan market-enhancing menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang baik. Dengan kata lain tata kelola pemerintahan dirancang untuk menarik investasi sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi dapat terlihat pada periode waktu berikutnya.

Sebagaimana pendapat Kong (2011) bahwa kualitas pemerintahan merupakan fundamental krusial bagi eksistensi kinerja ekonomi. Bergeraknya kemampuan tata kelola yang bagus melalui keputusan kebijakan publik seperti perlindungan hak milik, penegakan hukum yang berlaku dan stabilitas ekonomi dapat menstimulus peningkatan kegiatan investasi yang pada akhirnya dapat menaikkan tingkat pertumbuhan.

Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan performa kinerja ekonomi jika melalui kualitas pemerintahan. Sebagaimana Aidt, et. all (2007) berpendapat bahwa "*In the regime with high quality political institutions, corruption has a substantial negative impact on growth. In the regime with low quality institutions, corruption has no impact on growth*". Kualitas institusi yang lemah ini lah yang kemudian membawa desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi kinerja ekonomi melalui kualitas pemerintahan.

Kasus di Indonesia khususnya daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sebagai gambaran, tingkat integritas pemerintah daerah pada tahun 2011 dalam memerangi korupsi menurut laporan KPK (2011) untuk daerah-daerah percontohan seperti Pemko Surabaya (4,89), Pemkab Sidoarjo (4,54), Pemko Malang (3,43), Pemko Madiun (3,00), Pemko Kediri (2,32), Pemkab Jember (1,01) dikatakan masih rendah akan tetapi dapat diamati kondisi perekonomian daerah-daerah tersebut masih mengungguli daerah-daerah lainnya. Bukti tersebut nampak di Indonesia artinya bahwa kualitas kelembagaan yang rendah menjadikan korupsi pun tidak mempengaruhi kinerja ekonomi secara signifikan.

Implikasi Kebijakan

Ditemukannya hasil penelitian yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal masih belum mampu meningkatkan kualitas pemerintahan secara signifikan hal ini dilatarbelakangi oleh faktor kelemahan sistem desentralisasi (Khusaini, 2006) dan kelembagaan politik (Kyriacou dan Roca-sagales, 2009) di Indonesia dan di sisi lain desentralisasi fiskal mampu memperbaiki kinerja ekonomi yang dilatarbelakangi oleh *local taxing power*, meskipun derajat tingkat intervensi pemerintah pusat masih cukup tinggi akan tetapi faktanya daerah masih mampu meningkatkan kinerja ekonomi dan setidaknya *local taxing power* yang dimiliki oleh daerah saat ini masih mampu berperan dalam peningkatan kinerja ekonomi.

Implikasi kebijakan terkait tingkat kualitas pemerintahan yang masih rendah pada era desentralisasi fiskal yakni perlu adanya perbaikan kelembagaan dengan cara memperpendek proses birokrasi, meningkatkan monitoring dan pengawasan jalannya pemerintahan melalui sinergisitas yang lebih kuat dengan perguruan tinggi, LSM dan instansi lain yang bersangkutan dalam hal pengambilan keputusan pengambilan kebijakan-kebijakan strategis tata kelola daerah untuk menghasilkan keputusan bijak dan berdampak bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindakan *self-interest*. Selain itu juga perlu kiranya meningkatkan keseriusan dalam penegakan perundang-undangan bagi para pelaku yang terlibat penyalagunaan wewenang dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Terkait dengan hasil temuan kedua terkait desentralisasi fiskal mampu meningkatkan kinerja ekonomi, maka implikasi kebijakannya adalah pemerintah selaku pemegang otoritas fiskal perlu meningkatkan pendapatan guna mendorong konsumsi pemerintah. Dalam *Endogenous Theory* diungkapkan bahwa pajak memiliki peran bagi peningkatan kinerja ekonomi, akan tetapi pada titik jenuh tertentu dapat menurunkan aktivitas perekonomian. Oleh sebab itu dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian perlu pengupayaan peningkatan konsumsi pemerintah melalui efektivitas pengelolaan pajak yang didukung oleh kemampuan mengidentifikasi dan menggali potensi-potensi pajak oleh pemerintah tanpa peningkatan tarif pajak akan tetapi menambah basis pajak dengan demikian local taxing power meningkat dan kinerja ekonomi lebih baik melalui konsumsi pemerintah.

Terkait dengan temuan meningkatnya derajat desentralisasi fiskal berdampak pada meningkatkan performa ekonomi, hal ini didukung kebijakan pemerintah tahun 2011 terkait dengan efektif pelaksanaan pelimpahan pajak BPHTB pada daerah yang meliputi identifikasi, memungut dan mengumpulkan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sebagai sumber penerimaan terbesar, pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan konsumsi pemerintah melalui peningkatan layanan publik. Oleh sebab itu menurunnya intervensi pemerintah terkait desentralisasi penerimaan daerah akan membantu daerah dalam meningkatkan kinerja ekonomi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya membawa kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal masih menyisakan persoalan kualitas pemerintahan yang rendah yang mana dilatarbelakangi oleh belum berkembangnya kelembagaan politik dengan baik dan di sisi lain implementasi desentralisasi fiskal berdampak pada membaiknya kinerja ekonomi disebabkan oleh salah satunya kebijakan pelimpahan BPHTB tahun 2011 pada daerah sepenuhnya disinyalir mampu menstimulus konsumsi pemerintah melalui peningkatan penyediaan barang dan jasa publik sehingga mendorong kinerja ekonomi.

Hasil ini membawa pada implikasi yang mana peningkatan kualitas kelembagaan politik melalui pemotongan proses birokrasi untuk mencapai ketaraturan desentralisasi fiskal dalam memperbaiki kualitas pemerintahan khususnya di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Terkait hasil analisis kedua, mengingat upaya peningkatan derajat desentralisasi fiskal melalui pelimpahan otoritas fiskal daerah akan mendorong performa ekonomi daerah maka intervensi pemerintah pusat terhadap sumber-sumber fiskal daerah perlu dikaji ulang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti penggunaan data kualitas pemerintahan yang mana data diambil merupakan data persepsi para pelaku usaha mengenai tata kelola ekonomi daerah selain itu pengambilan periode penelitian yang terlalu singkat pada tahun 2011 saja dinilai kurang relevan dalam menjudge suatu kebijakan yang membutuhkan proses waktu dalam menilai hasilnya. Selain itu penggunaan data indikator untuk desentralisasi fiskal pada sisi penerimaan tanpa memasukkan sisi

pengeluaran dirasa kurang komprehensif dalam menjelaskan ukuran desentralisasi fiskal. Oleh sebab itu penelitian selanjutnya diharapkan mengkombinasikan penggunaan data yang memiliki rentangan waktu lebih panjang, menggunakan data yang lebih akurat dan memasukkan ukuran desentralisasi fiskal yang lebih konkrit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Bapak Ferry Prasetya SE., M.App.Ec.Int, selaku dosen pembimbing dan Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memungkinkan jurnal ini bisa terbit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali.*Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW*
- Ahrens,Joachim & Meurers,Martin. 2002. How Governance Affects the Quality of Policy Reform and Economic Performance: New Evidence for Economies in Transition.Goettingen:Department of economics.University of Goettingen
- Aidth,Toke.Dutta,Jayasri.sena,Vania. 2007. Governance regimes, Corruption and Growth Theory and Evidence.UK:ScienceDirect
- Altunbas,Yener & Thornton,John. 2012. Fiscal Decentralization and Governance.United States of America:SAGE.
- Aristovnik,Aleksander. 2012. Fiscal Decentralization in Eastern Europe:a Twenty-year Perspective.Muenchen: Munich Personal RePec Achive
- Badjun, Marijana.2005.The Quality of Governance and Economic Growth in Croatia.Econimic Faculty, Zagreb
- Faguet, Jean-Paul. 2011. Decentralization and Governance.London : Department of International Development and STICERED
- Hammond, George W & Tosun, Mehmet. 2009. The Impact of Local Decentralization on Economic Growth : Evidence from U.S Countries.Germany:IZA Discussion Paper
- Hyman, David N. 1983. *Public Finance : A Contemporary Application of Theory to Policy*.USA : The dryden Press
- Hyndriks, Jean & Myles, Gareth D. 2004. *Intermediete Public Economics* Rodriguez-Pose, Andres & Kroijer,Anne. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe.London:LEQS Paper

- Ivanyina, Maksym & Shah, Anwar. 2010. Decentralization (Localization) and Corruption New Cross-country Evidence. The World Bank: *Policy Research Working Paper 5299*
- Jin, Jing & Zou, Heng-fu. 2005. Fiscal Decentralization, Revenue and Expenditure Assignment, and Growth in China. *Journal of Asian Economics 16 (2005) 1047-1064: ScienceDirect*
- Khusaini, Moh. 2006. Kajian Desentralisasi Fiskal, Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Ekonomi, Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). Malang : Prasetya
- Kong, Tao. 2011. Governance Quality and Economic Growth. Canberra: Australian National University
- Lessman, Cristian. 2009. Fiscal Decentralization and Regional Disparity Evidence from Cross-section and Panel Data. Germany: Department of Business and Economics
- Lin, Justin Yifu & Liu, Zhiqiang. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. The University of Chicago
- Mello, Luiz de & Barenstein, Matias. 2001. Fiscal Decentralization and Governance. *International Monetary Fund*
- Oates, Wallace E. 2007. On The Theory and Practice of Fiscal Decentralization. USA: CREI
- Oktarida, Anggreani. 2012. Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Ilmiah Volume IV No.2, 2012*
- Parhah, Siti. Kontribusi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Data Cross-Section Tahun 2002. http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_EKONOMI_DAN_KOPERASI/SITI_PARHAH/KONTRIBUSI_DESENTRALISASI_FISKAL_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI.pdf. Diakses pada 23 desember 2013
- Rodriguez-Pose, Andres & Kroijer, Anne. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. London: LEQS Paper
- Zhang, Tao & Zou, Heng-fu. 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics 67 (1998) 221-240*
- Zulianto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. Semarang : UNDIP